



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Gresik sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah;
 - b. IKU Perangkat Daerah; dan
 - c. Indikator Program Prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator Program Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEGUNAAN IKU

Pasal 4

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai :

- a. perencanaan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan strategis perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- e. penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah;
- f. pelaporan kinerja pemerintah daerah dan Perangkat Daerah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1243) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 757), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan, kesehatan, pengendalian jumlah penduduk, dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita	Report base BPS	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Report base BPS	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Report base BPS	
		Angka Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama masa pendidikan dibagi penduduk usia lebih dari 15 tahun	Report base BPS	
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite	Report base BPS	Dinas Kesehatan
4	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rata-rata indeks pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan tutupan hutan	Report base BPS	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang	Persentase Jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Data IKK (IbuKota Kecamatan) Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Akses Air Bersih/Minum	$\frac{\text{Jumlah RT pemanfaat Air Bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Data RISPAM (Rencana Induk SPAM)	
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah pemanfaatan Tata Ruang}} \times 100\%$	data survey lapangan pemanfaatan RTRW	

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto secara <i>year on year</i>	Report base BPS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan
7	Meningkatnya iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Angka Pertumbuhan Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
8	Meningkatnya kinerja keuangan daerah	Rasio kemandirian Keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kepmendagri Nomor. 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan dari Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$		
9	Meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Report base BPS	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah penganggur usia (15-64)	Report base BPS	Dinas Tenaga Kerja
			$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$		

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
11	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaa, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia	Hasil nilai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan , Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Badan kepegawaian daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dievaluasi berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015	Hasil nilai evaluasi SAKIP	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
13	Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Hasil Nilai Opini BPK	Inspektorat, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Gresik	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan □ ≤50 = Kurang 51-69 = Cukup 70-85 = Baik 86-100 = Sangat Baik	Hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.	Report base Kemendesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
16	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita.	Report base BPS	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. Dinas Pendidikan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya akses pendidikan dasar	Angka Kelulusan SD sederajat	Jumlah Siswa SD Lulus Tahun ajaran n	X 100%	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
			Jumlah siswa SD sederajat pada tahun ajaran sebelumnya			
		Angka Kelulusan SMP sederajat	Jumlah Siswa SMP Lulus Tahun ajaran n	X 100%		Profil pendidikan Dinas Pendidikan
			Jumlah siswa SMP sederajat pada tahun ajaran sebelumnya			
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Jumlah anak putus sekolah SD/MI	X 100%		Profil pendidikan Dinas Pendidikan
			jumlah siswa SD/MI			

		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan		
2	Meningkatnya akses anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober}}{\text{Jumlah anak usia 3-6 Tahun}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Anak Usia Dini dan Non Formal	
			$\frac{\text{Jumlah peserta ujian kesetaraan yang lulus}}{\text{Jumlah peserta ujian kesetaraan}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan		
		Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan				
3	Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga Pendidik}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
4	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah SD yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SD}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan	
			Persentase SMP yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SMP}} \times 100\%$		Profil pendidikan Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kesehatan.

- Fungsi :
- Pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan kesehatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesehatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran	$\frac{X}{100.000}$	Laporan Puskesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Jumlah Kelahiran Hidup	KH		
		Angka Kematian Bayi	Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun	$\frac{X}{1.000}$	Laporan Puskesmas	
			Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu	KH		
		Presentasi balita gizi buruk	Jumlah balita dengan BB sangat kurang	$\frac{X}{100\%}$	Laporan Puskesmas	
			Jumlah balita yang ditimbang			
		Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri	$\frac{X}{100\%}$	Laporan Puskesmas	
Jumlah seluruh Desa						
Persentase Desa/Kelurahan STBM	Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM	$\frac{X}{100\%}$	Laporan Puskesmas			
	Jumlah Desa / Kelurahan					
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	$\frac{X}{100\%}$	Laporan Puskesmas	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Jumlah seluruh Desa / Kelurahan			
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam	$\frac{X}{100\%}$	Laporan Puskesmas	
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten						

		Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	
		Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	$\frac{\text{Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap}}{\text{Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	
		Case Fatality Rate DBD	$\frac{\text{Penderita DBD meninggal}}{\text{Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	(Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 %) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 %)	Puskesmas dan Klinik	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Persentase RS terakreditasi	$\frac{\text{Rumah sakit yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Sakit}} \times 100\%$	Report base data Rumah Sakit	
		Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%	$\frac{\text{Jumlah FKTP dengan nilai SKM} \geq 80\%}{\text{Jumlah seluruh FKTP}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	Rasio Dokter Spesialis Obgyn	$\frac{\text{Jumlah Dokter Spesialis Obgyn}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}}$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Rasio Dokter Spesialis Anak	$\frac{\text{Jumlah Dokter Spesialis Anak}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}}$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Rasio Dokter Umum	$\frac{\text{Jumlah Dokter Umum}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}}$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	

Rasio bidan per 100.000 penduduk	Jumlah Bidan	100.000 jumlah penduduk	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi
Rasio perawat per 100.000 penduduk	Jumlah Perawat	100.000 jumlah penduduk	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi
Rasio apoteker per 100.000 penduduk	Jumlah apoteker	100.000 jumlah penduduk	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin	X 100%	Perijinan Dinas Kesehatan
	Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan		
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin	Jumlah sarana kefarmasian (apotek dan toko obat) yang berijin	X 100%	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi
	Jumlah sarana kefarmasian		

3. RSUD

Tugas : Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD.

- Fungsi :
- Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait;
 - Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Direktur RSUD
		Tingkat Akreditasi	Hasil assesment yang dilaksanakan oleh KARS terhadap rumah sakit berdasarkan standar akreditasi yang berlaku	Hasil Akreditasi KARS	Direktur RSUD
2	Meningkatkan Kinerja, efisiensi dan Mutu Pelayanan	Bed Occupancy Rate (BOR)	<u>Jumlah hari perawatan</u>	Laporan RSUD	Wadir Medik
			$\frac{\text{Tempat tidur} \times \text{satuan hari} \times 100}{\text{BOR}}$		
			BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.		
		Average Length of Stay (ALOS)	<u>Jumlah Lama dirawat</u>	Laporan RSUD	Wadir Medik
$\frac{\text{Jumlah pasien keluar hidup+mati}}{\text{ALOS}}$					
ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.					
Turn Over Internal (TOI)	<u>(Jumlah TTxsatuan hari-Hari perawatan)</u>	Laporan RSUD	Wadir Medik		
	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar hidup+mati}}{\text{TOI}}$				

		TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.		
	Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar hidup+mati}}{\text{Tempat tidur}}$ <p>BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.</p>	Laporan RSUD	Wadir Medik
	Gross Date Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien RS (mati+hidup)} \times 100}$ <p>Indikator kematian total rawat inap yang keluar dari rumah sakit per 1000 penderita Keluar hidup atau mati. indikator ini memberikan penilaian tentang kulaitas rumah sakit meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian <48 jam pada umumnya adalah kasus-kasus kegawatdaruratan.</p>	Laporan RSUD	Wadir Medik
	Net Date Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (mati+hidup)} \times 100\%}$ <p>Indikator NDR ini dinilai sensitif karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit, merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan mutu pelayanan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan yang memadai, kualitas pelayanan penunjang medik, ketersediaan obat dan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	Laporan RSUD	Wadir Medik

3	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit & SDM yang profesional	Cost Recovery Rate (CRR)	Jumlah pendapatan	X 100%	Laporan RSUD	Wadir Umum dan Keuangan
			Jumlah operasional			
		Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit				
		Tingkat Kemandirian Keuangan	Jumlah pendapatan	X 100%		
Jumlah belanja						
Menggambarkan tingkat kemampuan dan kemandirian rumah sakit dalam membiayai seluruh belanja rumah sakit (belanja langsung dan belanja tidak langsung, termasuk belanja modal) dari pendapatan fungsional rumah sakit						

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik $\frac{\text{Total panjang jalan Kabupaten}}{\text{Total panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Data IKK (Ibu Kota Kecamatan) Jalan/ Jembatan	Bidang Bina Marga

2	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik	$\frac{\text{panjang Jaringan Irigasi kabupaten Kondisi baik}}{\text{panjang Jaringan Irigasi}} \times 100\%$	Data RIPI (Rencana Induk Pengelolaan Irigasi)	Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir	Penurunan luas area banjir	$\frac{\text{Jumlah luas area banjir tahun ke n-1} - \text{Jumlah luas area banjir tahun ke n}}{\text{Jumlah luas area banjir tahun ke n-1}} \times 100\%$	Hasil Survey Lapangan	Bidang Sumber Daya Air
4	Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pengguna Air Bersih Non PDAM}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Data RISPAM (Rencana Induk SPAM)	Bidang Cipta Karya
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan RTBL	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RDTR dan RTBL}}{\text{Jumlah pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	Hasil Survey Lapangan	Bidang Tata Ruang

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan swadaya yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Penurunan Rumah tidak layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah tidak layak huni tahun baseline} - \text{Jumlah Rumah tidak layak huni tahun } n}{\text{Jumlah Rumah tidak layak huni tahun baseline}} \times 100\%$	Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)	Bidang Rumah Swadaya
		Pertumbuhan Kapasitas Rumah Umum	$\frac{\text{Kapasitas Rumah Umum tahun } n - \text{Kapasitas Rumah Umum tahun baseline}}{\text{Kapasitas Rumah Umum tahun baseline}} \times 100\%$	Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)	Budang Rumah Umum
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkotaan Kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkotaan Kondisi baik}}{\text{Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkotaan}} \times 100\%$	Hasil konsultasi data base jalan lingkungan perkotaan	Bidang Prasarana Sarana Utiliitas Umum
2	Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum yang komprehensif dalam mendukung lingkungan hunian yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi				

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembangunan di kawasan kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Jumlah kawasan kumuh tahun baseline	X 100%	Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Bidang Rumah Kawasan Permukiman
			- Jumlah kawasan kumuh tahun n			

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya penegakan Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi}} \times 100\%$	Berita Acara Pelanggaran Perda dan Laporan Kegiatan Penertiban Perda	Bidang Penegakan Perundang-undangan

2	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Jumlah kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang diamankan	X 100%	Bagian Humas	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
			Jumlah kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkan pengamanan			
3	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Tantribum	Rasio LINMAS Per RT	Jumlah Linmas		Data Kecamatan	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah Rumah Tangga			

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas : Melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Fungsi :
- Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah;
 - Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah;
 - Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana;
 - Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Resiko bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Report base Desa Tangguh Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar air bersih pada saat Tanggap Darurat kekeringan	Persentase Desa Rawan Bencana kekeringan/Hidrometeorologi yang tertangani	Jumlah Desa Rawan Bencana kekeringan/Hidrometeorologi yang tertangani	X 100%	Report base Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan/Hidrometeorologi	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Jumlah Desa			
3	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase infrastruktur yang dipulihkan pasca bencana	Jumlah infrastruktur yang dipulihkan pasca bencana	X 100%	Report base data pemulihan infrastruktur	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			Jumlah infrastruktur yang rusak			

8. Dinas Sosial

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka pemulihan dan	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang direhabilitasi Jumlah PMKS X 100%	Report base data PMKS di Kabupaten Gresik	Bidang Rehabilitasi Sosial

	pengembangan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Persentase pelatihan terhadap jumlah PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilatih}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	Report base data PMKS di Kabupaten Gresik	Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Meningkatkan koordinasi, identifikasi danfasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Persentase perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang diberikan perlindungan dan jaminan}}{\text{Jumlah fakir miskin}} \times 100\%$	Report base data Fakir Miskin di Kabupaten Gresik	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Meningkatnya pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Persentase Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibina}}{\text{Jumlah Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial}} \times 100\%$	Report base data Lembaga Penyelenggara di Kabupaten Gresik	Bidang Pemberdayaan Sosial

9. Dinas Tenaga Kerja

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

Fungsi : a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;
b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;

- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
- e. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan daya saing tenaga kerja didukung dengan pengembangan produktivitas dan kualitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat	Data Pelatihan	Bidang Pelatihan Kerja
			$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikat}} \times 100\%$		
		Persentase lowongan kerja yang dipenuhi	Jumlah lowongan kerja yang dipenuhi	Data IPK	
			$\frac{\text{Jumlah lowongan kerja yang terdaftar}}{\text{Jumlah lowongan kerja yang dipenuhi}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Data Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			$\frac{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}}{\text{Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan}} \times 100\%$		
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja	Data BPS dan Penempatan	Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
			$\frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$		

10. Dinas Lingkungan Hidup

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan persampahan di kabupaten	Persentase luas area bebas sampah	$\frac{\text{Luas area terlayani}}{\text{Luas wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Report base luas area pelayanan persampahan	Bidang Pengelolaan Kebersihan
2	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gresik	Rasio Ruang Terbuka Hijau (luas wilayah keseluruhan)	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas wilayah Kabupaten}}$	Report base luas RTH	Bidang Pertanaman dan Dekorasi

3	Tercapainya peningkatan ketaatan lembaga dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase pelaku/lembaga dan usaha/kegiatan yang mentaati peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku/lembaga dan usaha/kegiatan yang mentaati peraturan Lingkungan Hidup	X 100%	- Report base lembaga/ pelaku usaha/kegiatan yang mentaati peraturan Lingkungan Hidup - Report base lembaga/ pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten	1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Bidang Tata Lingkungan
			Jumlah pelaku/lembaga dan usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten			

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan	Persentase Kepemilikan KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dan Suket Pengganti KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Database SIAK	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

	pendaftaran sipil	Perentase Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 - 18 th	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Database SIAK	Bidang Pelayanan Pendaftaran Sipil
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda dan anomali	$\frac{\text{Jumlah data ganda dan anomali tahun baseline} - \text{Jumlah data ganda dan anomali tahun ke n}}{\text{Jumlah data ganda dan anomali tahun baseline}} \times 100\%$	Database SIAK / Data Ditjen Dukcapil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3	Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase layanan adminduk ber-ISO	$\frac{\text{Jumlah layanan yang berstandarisasi ISO}}{\text{Jumlah layanan adm. adminduk}} \times 100\%$	Data Hasil Konsultan Sertifikasi ISO	1. Sekretariat 2. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase desa cepat berkembang sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan	$\frac{\text{jumlah desa cepat berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Data Desa	1. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa 2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang sehat	$\frac{\text{jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang sehat}}{\text{Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes)}} \times 100\%$	Data BUMDes	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

13. Dinas KB PP dan PA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Anak, dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Laporan bulanan pencapaian Peserta KB Aktif Jalur Pemerintah dan Swasta Kabupaten Gresik	1. Bidang Keluarga Berencana Dan Pengendalian Penduduk 2. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Advokasi
		Persentase pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak}} \times 100\%$	P2T-P2A Kabupaten Gresik	Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pengarusutamaan Hak Anak

	Tingkat capaian indikator Kabupaten Layak Anak	$\frac{\text{Nilai Kabupaten Layak Anak tahun } n - \text{Nilai Kabupaten Layak Anak tahun } n-1}{\text{Nilai Kabupaten Layak Anak tahun } n-1} \times 100\%$	Kementerian PPA	Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pengarus Utamaan Hak Anak
	PertumbuhanKete rwakilan Perempuan dalam Jabatan Legislatif	$\frac{\text{Jumlah perempuan dalam jabatan legislatif}}{\text{Jumlah jabatan pada legislatif}} \times 100\%$	Data Anggota DPRD dari data BPS	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarus Utamaan Gender
PertumbuhanKete rwakilan Perempuan dalam Jabatan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah perempuan dalam jabatan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah jabatan pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Data Pejabat dari BKD	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarus Utamaan Gender	
Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	P2T-P2A Kabupaten Gresik	Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pengarus Utamaan Hak Anak	

14. Dinas Perhubungan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai	Persentase sarana prasarana perhubungan yang layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana perhubungan yang layak fungsi}}{\text{Jumlah sarana prasarana perhubungan yang tersedia}} \times 100\%$	Bidang Sarana dan Prasarana	Bidang Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	Persentase Angkutan Umum Sesuai dengan SPM	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang sesuai SPM}}{\text{Jumlah Angkutan Umum yang tersedia}} \times 100\%$	Bidang Angkutan	Bidang Angkutan
		Persentase Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar.	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar}}{\text{Jumlah angkutan penyeberangan diatas air yang tersedia}} \times 100\%$	Bidang Angkutan	Bidang Angkutan
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Penurunan titik rawan kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\text{Jumlah titik rawan kecelakaan tahun n-1} - \text{titik rawan kecelakaan tahun n}}{\text{Jumlah titik rawan kecelakaan tahun n-1}} \times 100\%$	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Report base data desa/kelurahan memiliki akses jaringan telekomunikasi	Bidang Komunikasi dan Persandian
2	Meningkatnya penyelenggaraan e-Government	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah sistem informasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah sistem informasi}} \times 100\%$	Data aplikasi	Bidang Pengembangan e-Government
		Persentase layanan publik berbasis elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan publik berbasis elektronik}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan e-Government	
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah	Pertumbuhan kunjungan website	$\frac{\text{Jumlah pengunjung website tahun ke } n - \text{Jumlah pengunjung website tahun ke } n-1}{\text{Jumlah pengunjung website tahun ke } n-1} \times 100\%$	Counter website Pemerintah Kabupaten Gresik	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik

16. Dinas Koperasi UKM dan Perindag

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase pertumbuhan Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif tahun } n - \text{jumlah koperasi aktif tahun } n-1}{\text{Jumlah koperasi aktif tahun } n-1} \times 100\%$	Database Keragaman Koperasi	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang dibina	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang dibina tahun } n}{\text{Jumlah usaha mikro tahun } n} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan data lapangan	Bidang Usaha Mikro
3	Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Persentase Alat UTTP bertera sah	$\frac{\text{Jumlah Alat UTTP bertera sah}}{\text{Jumlah Alat UTTP}} \times 100\%$	Laporan UPT Kemetropolitan legal	Bidang Perdagangan

		Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan.	$\frac{\text{Nilai neraca perdagangan tahun } n - \text{Nilai neraca perdagangan tahun } n-1}{\text{Nilai neraca perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$	Dokumen E-SKA kemendagri (Surat Keterangan Asal)	Bidang Perdagangan
		Persentase Pasar Kabupaten yang dipelihara setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah Pasar Kabupaten Yang Dipelihara}}{\text{Jumlah Pasar Kabupaten}} \times 100\%$	Laporan fisik pembangunan dan pemeliharaan pasar kabupaten	Bidang Perdagangan
4	Meningkatnya Industri Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Industri Mikro Kecil dan Menengah yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah yang dibina}}{\text{Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan data lapangan	Bidang Perindustrian

17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program urusan Penanaman Modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, dan penandatanganan izin urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi proses pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN)	Report base realisasi investasi PMA dan PMDN melalui SPIPISE	1. Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal; 2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai SKM terhadap pelayanan perizinan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Eksternal Kepuasan Masyarakat	1. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan; 2. Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan.

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi urusan Kepemudaan dan olah raga;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dan olah raga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang meraih penghargaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan.	Jumlah pemuda yang meraih penghargaan	Report base pemuda berprestasi	Bidang Kepemudaan
			$\frac{\text{Jumlah pemuda yang difasilitasi}}{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti turnamen}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan prestasi olahraga daerah	Persentase Cabang Olah Raga Berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapat medali	Report base cabor berprestasi	Bidang Olah Raga
			$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang mendapat medali}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti turnamen}} \times 100\%$		

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang arsip.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pemustaka	$\frac{\text{Jumlah pemustaka tahun } n - \text{Jumlah pemustaka tahun } n-1}{\text{Jumlah pemustaka tahun } n-1} \times 100\%$	Data Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan	Nilai SKM Pelayanan Perpustakaan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
3	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Persentase Pencipta Arsip yang melakukan tata kelola kearsipan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Pencipta Arsip yang melakukan tata kelola kearsipan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Pencipta Arsip}} \times 100\%$	Data Kearsipan	Bidang Kearsipan
		Nilai SKM pembinaan kearsipan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		

20. Dinas Perikanan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan.

Fungsi : a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Produksi dan produktifitas usaha kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n} - \text{Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1}} \times 100\%$	Laporan produksi perikanan budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n} - \text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1}}{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1}} \times 100\%$	Laporan produksi perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
2	Tercapainya kecukupan gizi dan protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan: Angka Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	$\frac{\text{Jumlah hasil olahan perikanan ikan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \text{ kg / kapita / tahun}$	Data konsumsi ikan	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan	Persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi	$\frac{\text{Luas kawasan pesisir yang direhabilitasi tahun n} - \text{Luas kawasan pesisir yang direhabilitasi tahun n-1}}{\text{luas kawasan pesisir yang direhabilitasi tahun n-1}} \times 100\%$	Data Konservasi SDA Perikanan	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya, museum dan situs serta terpeliharanya budaya daerah	Jumlah potensi cagar budaya yang direkomendasikan	Berpotensi Cagar Budaya adalah sudah dilakukan pendataan dan registrasi tetapi belum bisa dikatakan sebagai Cagar Budaya karena belum dikaji oleh tim ahli Rekomendasi berarti objek tersebut sudah disidangkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan statusnya sudah Cagar Budaya tinggal menunggu Keputusan Bupati	Report base data cagar budaya	Bidang Kebudayaan	
		Persentase Jumlah Seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah Seni dan budaya yang dilestarikan	X 100%		Report base data kelompok seni dan budaya
			Jumlah Seni dan budaya Kabupaten Gresik			
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisata mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke n - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke n-1	X 100%	Report base data kunjungan wisatawan mancanegara	
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke n-1			
		Persentase Pertumbuhan kunjungan wisata dalam negeri	Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri tahun ke n - Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri tahun ke n-1	X 100%	Report base data kunjungan wisatawan domestik	
			Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri tahun ke n-1			

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku usaha ekonomi kreatif	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n} - \text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n-1}}{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n-1}} \times 100\%$	Report base data industri pariwisata (TDUP)	Bidang Pengembangan Destinasi Wisata
			$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata tahun n} - \text{Jumlah destinasi wisata tahun baseline}}{\text{Jumlah destinasi wisata tahun baseline}} \times 100\%$		
		Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n} - \text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n-1}}{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tahun ke n-1}} \times 100\%$	Report base data destinasi wisata	
			$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata tahun n} - \text{Jumlah destinasi wisata tahun baseline}}{\text{Jumlah destinasi wisata tahun baseline}} \times 100\%$		

22. Dinas Pertanian

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

- Fungsi :
- Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanian dan di bidang pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
 - Pengkoordinasian peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian	Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n-1	X 100%	Data statistik pertanian	1. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2. Bidang Sarana dan Prasarana, 3. Bidang Usahatani dan Penyuluhan
			$\frac{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n}}{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n-1}} \times 100\%$			
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n-1	X 100%	Data statistik perkebunan	1. Bidang Perkebunan 2. Bidang Sarana dan Prasarana, 3. Bidang Usahatani dan Penyuluhan
			$\frac{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n}}{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n-1}} \times 100\%$			
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan	Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n-1	X 100%	Data statistik peternakan	1. Bidang Peternakan 2. Bidang Sarana dan Prasarana, 3. Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan
			$\frac{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n}}{\text{Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n-1}} \times 100\%$			
2	Meingkatkan keanekaragaman produk olahan pertanian	Persentase peningkatan produk olahan hasil pertanian	Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n - Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1	X 100%	Data produk olahan hasil pertanian	Bidang Usahatani dan Penyuluhan
			$\frac{\text{Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n}}{\text{Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1}} \times 100\%$			

3	Meningkatnya ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan pangan utama	Jumlah kumulatif pangan utama tahun n (Ton GKG)	Data produksi bahan pangan utama	Bidang Pangan
---	-------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---------------

23. Dinas Pertanahan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- Fungsi :
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan perencanaan program urusan pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan ; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Data tanah yang bersertifikat pada SIMBADA	Bidang administrasi pertanahan
2	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah tanah yang dibebaskan}}{\text{Jumlah tanah yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Report base data pembebasan tanah	Bidang Pembebasan Lahan

24. Inspektorat

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, rewiu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

- Fungsi :
- Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, rewiu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

- b. Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut hasil Audit Internal	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan audit internal}} \times 100\%$	LHP APIP	Inspektur Pembantu Wilayah
		Persentase tindak lanjut hasil Audit Eksternal	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan audit eksternal}} \times 100\%$	LHP BPK	Inspektur Pembantu Wilayah
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	LHP Khusus/Kasus	Inspektur Pembantu Wilayah
2	Meningkatkan kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP/Level kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP diukur dari self assestment BPKP	Penilaian dan BPKP	Inspektur Pembantu Wilayah
3	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah melalui pelaksanaan SPIP	Level maturitas SPIP	Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHE BPKP	Inspektur Pembantu Wilayah

25. BAPPEDA

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah.

- Fungsi :
- Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah;
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
 - Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;
 - Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Renstra Kualitas Baik}}{\text{Jumlah Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Renstra SKPD	1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
		Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Renja Kualitas Baik}}{\text{Jumlah Dokumen Renja}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD	

2	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD}}{\text{Jumlah Usulan Musrenbang}} \times 100\%$	Berita Acara Musrenbang	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	$\frac{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai capaian minimal 76}}{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan RPJMD}} \times 100\%$	LKPj	
3	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah inovasi daerah tahun ke n} - \text{Jumlah inovasi daerah tahun ke n-1}}{\text{Jumlah inovasi daerah tahun ke n-1}} \times 100\%$	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Bidang Penelitian dan Pengembangan 2. Bidang Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

26. BPPKAD

Tugas : Membantu Bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Perbup tentang Penjabaran APBD dan Laporan Keuangan OPD	1. Bidang Anggaran 2. Bidang Perbendaharaan
		Persentase data aset yang akurat	$100\% - ((\text{selisih jumlah aset sebelum dan setelah audit} / \text{jumlah aset sebelum audit}) \times 100\%)$	Hasil Audit BPK	Bidang Pengelolaan Aset
2	Meningkatnya pendapatan Daerah	Capaian pendapatan daerah	$\frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017	1. Bidang Pajak Daerah Lainnya 2. Bidang Penagihan dan Pelayanan 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

27. BKD

Tugas : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara.

Fungsi :

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur sipil Negara;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara; dan

f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN	Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi,	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi,	X 100%	Laporan Pelaksanaan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural	
			Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
		Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik,	Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP antara 76 s/d 100	X 100%	Rekapitulasi penyampaian SKP	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
			Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
		Prosentase ASN yang memenuhi ketentuan jam kerja	Jumlah ASN yang memiliki indeks disiplin baik	X 100%	Rekapitulasi hasil absensi ASN	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
			Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
2	Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan strandart kompetensi,	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan analisa jabatan	X 100%	Dokumen Penataan ASN (SIMPEG)	
			Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
		Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Jumlah formasi ASN yang belum terisi	X 100%	Dokumen Analisa Kebutuhan ASN (SIAKAS)	Bidang Data Formasi dan Pengembangan ASN
			Jumlah formasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian	Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	

28. Sekretariat Daerah

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Ortala
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Hasil evaluasi penyusunan LPPD oleh Kemendagri	Laporan Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Bagian Pemerintahan Umum
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik	$\frac{\text{Jumlah Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan}} \times 100\%$	Report based hasil SKM	Bagian Ortala
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Report based data penanganan pengaduan masyarakat	Bagian Humas dan Protokol
4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase capaian PAD sektor BUMD	$\frac{\text{PAD Sektor BUMD tahun ke n}}{\text{PAD tahun ke n}} \times 100\%$	Report based PAD sektor BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA

29. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

- Fungsi :
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
 - Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Nilai Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (DPRD) sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol
		Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah}} \times 100\%$	Report base fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

30. Kantor Kesbangpol

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga.

- Fungsi :
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan kondusifitas dan keharmonisan Gresik melalui peningkatan kewaspadaan Wawasan Kebangsaan dan hubungan antar lembaga	Persentase Penurunan Jumlah Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial tahun (n-1)} - \text{Jumlah konflik sosial tahun n}}{\text{Jumlah konflik sosial tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data konflik	1. Seksi Wawasan Kebangsaan 2. Seksi Kewaspadaan 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

31. Kecamatan

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja
- k. Kecamatan; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1. Seksi Pemerintahan 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Seksi Ekonomi 4. Seksi Pembangunan 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	(Jumlah Siswa SD /Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun) x 100%	Data Profil Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;	(Jumlah Siswa SMP/Jumlah Penduduk usia 13-15 Tahun) x 100%	Data Profil Pendidikan
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Persentase Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang dibina	(Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang dibina /Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) x 100%	Data Profil Pendidikan
		Persentase PAUD yang tersertifikasi	(Jumlah PAUD yang tersertifikasi /Jumlah PAUD) x 100%	Data Profil Pendidikan
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 dan D4	(Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan D4/ Jumlah Guru) x 100%	Data Profil Pendidikan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD sesuai SPM	$(\text{Jumlah SD dengan Sarana Prasarana sesuai SPM} / \text{Jumlah SD}) \times 100\%$	Data Profil Pendidikan
		Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP sesuai SPM	$(\text{Jumlah SMP dengan Sarana Prasarana sesuai SPM} / \text{Jumlah SMP}) \times 100\%$	Data Profil Pendidikan
5	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Masyarakat Gizi	Cakupan pelayanan nifas	$(\text{Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh nakes disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun}) \times 100\%$	Laporan Puskesmas
		Cakupan peyanan KN lengkap	$(\text{Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun}) \times 100\%$	Laporan Puskesmas
		Persentase balita gizi kurang	$(\text{Jumlah balita dengan BB sangat kurang} / \text{Jumlah balita dengan BB Kurang}) \times 100\%$	Laporan Puskesmas
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	$(\text{Jumlah remaja usia 12 - 18 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart} / \text{Jumlah seluruh remaja}) \times 100\%$	Laporan Puskesmas
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	$(\text{Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart} : \text{Jumlah seluruh lansia}) \times 100\%$	Laporan Puskesmas

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	(Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS : Jumlah Rumah tangga) x 100%	Laporan Puskesmas
7	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga	Persentase keluarga yang ber STBM	(Jumlah keluarga yang ber STBM : Jumlah Keluarga) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase TTU yang bersanitasi dasar	(Jumlah TTU yang diperiksa / di inspeksi penyehatan lingkungan : Jumlah TTU (Tempat Tempat Umum) x 100%	Laporan Puskesmas
8	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	(Jumlah bayi usia 0-11 yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap : Jumlah bayi usia 0-11 bulan) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	(Jumlah penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi : Jumlah penyakit potensi wabah) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	(Σ Pengunjung posbindu usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan dlm kurun waktu 1 tahun : Σ warga usia 15-59 tahun yg ada di wilayah kerja dlm kurun waktu satu tahun) x 100%	Laporan Puskesmas

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	Jumlah pasien TB (semua kasus) yang diobati dan dilaporkan selama satu tahun	Laporan Puskesmas
		Insiden/Angka kesakitan DBD	(Jumlah kasus baru Penderita DBD dalam kurun waktu tertentu : Jumlah populasi dalam kurun waktu tertentu) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	(Jumlah Pasien pasung yang ditemukan : Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam periode tertentu) x 100%	Laporan Puskesmas
9	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	(Jumlah puskesmas terakreditasi : Jumlah puskesmas) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase Pustu sesuai standar	(Jumlah Pustu sesuai standar : Jumlah Puskesmas pembantu) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	(Jumlah Ponkesdes sesuai standar : Jumlah Ponkesdes) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	(Jumlah klinik yang memiliki ijin operasional : Jumlah klinik) x 100%	Perijinan Dinas Kesehatan
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	(Jumlah RS yang memiliki ijin operasional : Jumlah Rumah Sakit) x 100%	Perijinan Dinas Kesehatan
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	(Jumlah penyehat tradisional terdaftar: Jumlah penyehat tradisional) x 100%	Perijinan Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	(Jumlah Tenaga Kesehatan minimal D3 yang Berijin : Jumlah Tenaga Kesehatan minimal D3) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	(Jumlah Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat : Jumlah Sarana Pengelolaan Makmin) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	(Jumlah item Obat dan Perbekalan kesehatan yang ketersediaannya \geq 100% : Jumlah total item obat dan perbekalan kesehatan yang ada) x 100%	Laporan Puskesmas
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	(Jumlah Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar : Jumlah Puskesmas Dan Jaringannya) x 100%	Laporan Puskesmas
11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes	Rata-rata persentase puskesmas, pustu, ponkesdes yang dibangun	Laporan Puskesmas

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
12	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	(Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok : Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang ada) x 100%	Laporan Puskesmas dan RSUD
13	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Blud	Persentase Patient Safety	(Tingkat keselamatan pasien yang berkunjung : seluruh kunjungan) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	(Jumlah indikator SPM yang terpenuhi targetnya : Jumlah indikator SPM) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase keluhan pasien (number of complain)	(Jumlah keluhan pasien yang ditindaklanjuti : Jumlah seluruh kunjungan) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi	(jumlah pasien yang dirujuk : Jumlah seluruh kunjungan) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase pasien pulang paksa	(Jumlah pasien yang mengajukan pulang paksa : Jumlah Pasien seluruhnya) x 100%	Laporan RSUD

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition)	(Jumlah kunjungan pasien baru : Jumlah seluruh kunjungan) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase perolehan pasien lama (customer loyalty)	(Jumlah kunjungan pasien lama : jumlah seluruh kunjungan) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase HAIS (Healthcare Associated Infection)	(Jumlah seluruh pasien yang dirawat : jumlah pasien yang terinfeksi) x 100%	Laporan RSUD
		Persentase pemenuhan laporan keuangan,	(Jumlah laporan keuangan yang hrs dilengkapi : Jumlah seluruh laporan keuangan) x 100%	Laporan RSUD
		Sales Growth Rate (SGR)	Perbandingan pendapatan fungsional dari jasa layanan tahun ini dibanding pendapatan sebelumnya	Laporan RSUD
		Curent Rasio	(Asset lancar/Kewajiban Jangka Pendek) x 100%	Laporan RSUD
		Cash Rasio	(Cash+Bank : Kewajiban Jangka Pendek) x 100%	Laporan RSUD
		Solvabilitas	(Jumlah total aset : Kewajiban jangka pendek+panjang) x 100%	Laporan RSUD

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Quick Rasio	$(\text{Asset lancar} : \text{Persediaan}) \times 100\%$	Laporan RSUD
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	$(\text{Dokumen yang harus terpenuhi} : \text{Jumlah seluruh dokumen}) \times 100\%$	Laporan RSUD
		Persentase penilaian akreditasi RS pendidikan,	$(\text{penilaian akreditasi RS pendidikan yg mencapai target} : \text{Jumlah seluruh standar akreditasi}) \times 100\%$	Laporan RSUD
		Persentase kecukupan SDM berdasarkan katagori SDM	$(\text{jumlah kebutuhan SDM yang dipersyaratkan} : \text{Jumlah seluruh SDM yang ada}) \times 100\%$	Laporan RSUD
14	Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau	Persentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	$(\text{Jumlah sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok} / \text{Jumlah kebutuhan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok}) \times 100\%$	Laporan RSUD
15	Program Peningkatan kualitas Jalan dan	Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$(\text{Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik} / \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100\%$	Report base Data Jalan Dinas PUTR

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Jembatan	Presentase Panjang jembatan dalam kondisi baik	(Panjang Jembatan kondisi baik/Total Panjang Jembatan) x 100%	Report base Data Jembatan Dinas PUTR
16	Program Peningkatan kualitas prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan	(Jumlah PJU tersedia / jumlah PJU yang dibutuhkan) x 100%	Report base Data PJU Dinas PUTR
17	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara	(Panjang Irigasi yang dipelihara / panjang irigasi kabupaten) x 100%	Report base Data Irigasi Dinas PUTR
18	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	Volume daya tampung waduk kab /volume ideal daya tampung waduk x 100%	Report base Data Daya Tampung Waduk Dinas PUTR
19	Program Pengendalian Banjir	% Saluran Pembuang Kondisi Baik	(Panjang Saluran pembuang kondisi bai /total panjang saluran) x 100%	Report base Data Saluran Pembuang Dinas PUTR

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
20	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Saluran perkotaan kondisi baik}}{\text{total panjang saluran perkotaan}} \times 100\%$	Report base Data saluran perkotaan Dinas PUTR
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/ Minum	Jumlah Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	$\frac{\text{(Jumlah RT pengguna air bersih non PDAM)}}{\text{jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	Report base Data Pengguna air bersih non PDAM Dinas PUTR
22	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun	-	Data RDTR dan RTBL
23	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penurunan jumlah pelanggaran tata ruang	$\frac{\text{(jumlah pelanggaran tata ruang Tahun (n-1))}}{\text{jumlah pelanggaran tata ruang Tahun (n)}} \times 100\%$	Report base Data Pelanggaran tata ruang Dinas PUTR
24	Program pengaturan jasa konstruksi	Persentase peningkatan jumlah sertifikat bangunan laik fungsi yang diterbitkan	$\frac{\text{(Jumlah bangunan yang bersertifikat laik fungsi tahun n - Jumlah bangunan yang bersertifikat laik fungsi tahun n-1)}}{\text{Jumlah bangunan yang bersertifikat laik fungsi tahun n-1}} \times 100\%$	Report base Data Bangunan laik fungsi Dinas PUTR

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
25	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Persentase pembangunan infrastruktur strategis sesuai tata ruang	(Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis sesuai tata ruang : Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis) x 100%	Report base Data Pembangunan Infrastruktur strategis Dinas PUTR
26	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	(Jumlah Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani : Jumlah Rumah Swadaya tidak layak huni) x 100%	Report Base Data Rumah Swadaya tidak layak huni
27	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum	Persentase Penurunan Backlock Rumah umum	((Jumlah Backlock Rumah umum Tahun n-1 - Jumlah Backlock Rumah umum Tahun n) : Jumlah Backlock Rumah umum Tahun n) x 100%	Report Base Data Backlock Rumah umum
28	Program Peningkatan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan PSU	Persentase Prasarana Sarana dan utilitas umum perkotaan yang dipelihara	(Jumlah Prasarana Sarana dan utilitas umum perkotaan yang dipelihara : Prasarana Sarana dan utilitas umum perkotaan) x 100%	Report Base Prasarana Sarana dan utilitas umum perkotaan
29	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	(Luas Kawasan Kumuh yang ditangani : Luas Kawasan Kumuh) x 100%	Report Base Luas Kawasan Kumuh

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
30	Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dalam rangka penegakan perda	(Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 : Jumlah pelanggaran K3) x 100%	Report base penyelesaian pelanggaran K3
31	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	(Polisi Pamong Praja : 10.000 Penduduk)	Data Kepegawaian Satpol PP
32	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase Linmas yang dibina	(Jumlah Linmas yang dibina : Jumlah Linmas) x 100%	Report base data linmas
33	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana yang dilatih	(Jumlah Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana yang dilatih : Jumlah Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana) x 100%	Report Base data Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
34	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penyaluran Logistik terhadap korban bencana	Jumlah logistik yang disalurkan (KK) : Jumlah korban bencana (KK)	Report Base data Penyaluran Logistik Bencana
35	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase kerusakan infrastruktur pasca bencana yang ditangani	(Jumlah kerusakan infrastruktur pasca bencana yang ditangani (rumah) : Jumlah kerusakan infrastruktur pasca bencana (rumah)) x 100%	Report Base data penanganan Bencana
36.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Rasio penanganan penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani : Jumlah penyandang disabilitas:	Report Base Data penyandang disabilitas
37.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang dtangani : Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial	Report Base Data PMKS
38.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi PMKS	(Jumlah pelayanan dan pelatihan bagi PMKS tahun n - Jumlah pelayanan dan pelatihan bagi PMKS tahun n-1) : Jumlah pelayanan dan pelatihan bagi PMKS tahun n-1) x 100	Report Base Data Pelatihan PMKS

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
39.	Program Pembinaan Bagi Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Panti Asuhan yang difasilitasi	(Jumlah Panti Asuhan yang difasilitasi : Jumlah Panti Asuhan) x 100%	Report Base Data Panti Asuhan
40.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani : Jumlah PMKS	Report Base Penanganan PMKS
41.	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	(Jumlah Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi: Jumlah Taman Makam Pahlawan) x 100%	Report Base Data Makam Pahlawan
42.	Program Pemberdayaan Kelembagaan	Persentase penanganan WRSE	(Jumlah WRSE yang ditangani : Jumlah WRSE) x 100%	Report Base Data WRSE

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Kesejahteraan Sosial	Persentase data PMKS dan PSKS yang tervalidasi	(Jumlah PMKS dan PSKS yang tervalidasi: Jumlah PMKS dan PSKS) x 100%	Report Base Penanganan PMKS
		Jumlah Keluarga rentan yang ditangani	-	Report Base Data keluarga rentan
43.	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	(Jumlah Pelatihan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven Tahun n - Jumlah Pelatihan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven Tahun n-1) : Jumlah Pelatihan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven Tahun n-1) x 100%	Report Base Pelatihan Kerja
		Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	(Jumlah Pelatihan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship Tahun n - Jumlah Pelatihan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship Tahun n - 1) : Jumlah Pelatihan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship Tahun n-1) x 100%	Report Base Pelatihan Kerja
44.	Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	(Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan: Jumlah Informasi Pasar Kerja) x 100%	Informasi Pasar Kerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
45.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan	(Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan : Jumlah perusahaan) x 100%	Report Base data Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan
46.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	(Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan : Jumlah Pencari Kerja) x 100%	Report Base penempatan pencari kerja
47.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penanggungungan dan Pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah yang diverifikasi dalam rangka sertifikasi asset	(Jumlah Aset pemerintah yang didata dan diverifikasi : Jumlah Aset pemerintah yang direncanakan dalam 1 tahun) x 100%	Data Aset Pemerintah Daerah
48.	Program Pembinaan dan Pembebasan Lahan	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan	(Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi : Jumlah Pengaduan sengketa tanah) x 100%	Report Base penyelesaian konflik pertanahan
49.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	(Volume produksi sampah m3/hari yang ditangani : Volume produski sampah m3/hari) x 100%	Report Base pengelolaan persampahan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
50.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Prosentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan	(Luas Ruang Terbuka Hijau : luas wilayah perkotaan) x 100%	Data RTH
51.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Persyaratan Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup	(Jumlah Pelaku Usaha Taat Terhadap Persyaratan Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup : Jumlah Pelaku Usaha) x 100%	Data Pelaku Usaha Taat Terhadap Persyaratan Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
52.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Lokasi dengan tingkat polusi sesuai ambang batas	(Jumlah Lokasi yang dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dengan tingkat polusi sesuai ambang batas : Jumlah Lokasi usaha/kegiatan) x 100%	Report Base ambang batas polusi
53.	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	(Jumlah Lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup : Jumlah Lembaga (sekolah/ Kelompok masyarakat/Perusahaan) x 100%	Data lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup
		Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup : Jumlah kelompok masyarakat) x 100%	Data Kelompok masyarakat yang yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
54.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lokasi konservasi	$(\text{lokasi konservasi} : \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$	Data Lokasi konservasi
55.	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	$(\text{Jumlah perekaman e-KTP} : \text{Jumlah Penduduk wajib KTP}) \times 100\%$	Database SIAK
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$(\text{Jumlah penduduk usia} < 17 \text{ tahun yang memiliki KIA} : \text{Jumlah penduduk usia} < 17 \text{ tahun}) \times 100\%$	Database SIAK
56.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-Tahun	$(\text{Jumlah penerbitan akta kelahiran per-tahun} : \text{Jumlah kelahiran per-tahun}) \times 100\%$	Database SIAK
		Persentase Penertiban Akta Kematian Per-Tahun	$(\text{Jumlah penerbitan akta kematian} : \text{Jumlah kematian yang dilaporkan}) \times 100\%$	Database SIAK
57.	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persentase validasi Data Ganda dan Anomali	$(\text{Jumlah validasi Data Ganda dan Anomali} : \text{Jumlah Data Ganda dan Anomali}) \times 100\%$	Database SIAK
58.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	$(\text{Jumlah Layanan kependudukan yang memiliki SOP} : \text{Jumlah Layanan Administrasi Kependudukan}) \times 100\%$	SOP Layanan Adminduk

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
59.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data administrasi kependudukan	-	Report Base Pemanfaatan Data Kependudukan
60.	Program Peningkatan Potensi Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik	(Jumlah Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik: Jumlah Desa) x 100%	Report Base pengelolaan aset desa
		Persentase Desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik	(Jumlah Desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik : Jumlah Desa) x 100%	Report Base pengelolaan APBDes
		Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang baik	(Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang baik Jumlah Desa) x 100%	Data Perencanaan Desa
		Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Jumlah desa yang melaksanakan kerja sama Jumlah Desa) x 100%	Data Kerjasama Desa
61.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa) x 100%	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
62.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rasio swadaya masyarakat dibanding APBDesa	(Jumlah swadaya masyarakat dalam APBDesa: Jumlah APBDesa) x 100%	Report Base Swadaya masyarakat
63.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa	(Jumlah perangkat Desa yang dilatih: Jumlah perangkat desa) x 100%	Data pelatihan perangkat desa
64.	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki AD ART	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki AD ART : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) x 100%	Data Laporan Bumdes
		Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang mengalami peningkatan pendapatan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang mengalami peningkatan pendapatan : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) x 100%	Data Laporan Bumdes

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Prosentase Pasar desa dalam kondisi baik	(Jumlah Pasar Desa dalam kondisi baik : Jumlah Seluruh Pasar Desa) x 100%	Data pasar desa
		Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	(Jumlah TTG yang dihasilkan POKMAS atau masyarakat : Jumlah Pokmas) x 100%	Data TTG
65	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	Jumlah pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100%	Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kecamatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)
66	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;	Jumlah Petugas Penyuluh KB ditambah Jumlah Petugas Lapangan KB dibagi Jumlah desa kelurahan	Data Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
67	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB dikali 100%	Data Pasangan Usia Subur
68	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah dibagi Jumlah Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan	Data perempuan pengampu jabatan pada Organisasi Kemasyarakatan dan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Dalam Pembangunan		Pemerintahan Daerah dikali 100%	Pemerintah Daerah
69	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) dibagi Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dikali 100%	Data penanganan pengaduan kekerasan perempuan dan anak
70.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibutuhkan dikali 100%	Data sarana dan prasarana perhubungan
		Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	Jumlah Lokasi Parkir yang ditetapkan dibagi Jumlah Lokasi Parkir yang berpotensi dikali 100%	Data lokasi parkir
71.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dipelihara;	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dipelihara dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia dikali 100%	Data pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
72.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum;	Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum tahun : (n-1) dikurangi Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum tahun : (n) dibagi Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum tahun : (n-1)	Data angka kecelakaan lalu lintas
		Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean	Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean tahun ke (n) dikurangi Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean tahun ke (n-1) dibagi Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean tahun ke (n)	Data penumpang angkutan penyeberangan Gresik - Bawean
73.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Traffic Light yang terpasang ATCS	Jumlah Traffic Light yang dipasang ATCS dibagi Jumlah Traffic Light dikali 100%	Data traffic light
		Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia dibagi Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang dibutuhkan dikali 100%	Data fasilitas keselamatan lalu lintas
		Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Jumlah kawasan tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dibagi Jumlah Kawasan Tertib Lalu Lintas yang dibutuhkan dikali 100%	Data kawasan tertib lalu lintas
74.	Program pengembangan	Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik	Jumlah hotspot di ruang publik tahun n dikurangi Jumlah hotspot di ruang publik	Data hotspot di ruang publik

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Komunikasi Daerah		tahun n-1 dibagi Jumlah hotspot di ruang publik tahun n-1	
75.	Program Pengembangan E-Government	Persentase SKPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	Jumlah SKPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Data pengakses WAN dan Fiber Optic
		Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan		Data kecepatan akses internet
		Persentase sistem informasi yang aktif	Jumlah sistem informasi yang aktif dibagi jumlah sistem informasi dikali 100%	Data sistem informasi
		Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	Jumlah ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi dibagi Jumlah ASN dikali 100%	Data pemanfaatan Teknologi Informasi
		Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	Jumlah Pedoman yang ada dibagi Jumlah Pedoman yang dibutuhkan dikali 100%	Dara Pedoman Penyelenggaraan e-gov
76.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data statistik (survey dan report based) yang dipublikasikan	Jumlah data statistik (survey dan report based) yang dipublikasikan dibagi Jumlah data statistik (survey dan report based) yang dilaporkan dikali 100%	Report base data statistik
		Persentase KIM yang dibina	Jumlah KIM yang dibina dibagi Jumlah KIM dikali 100%	Data pembinaan KIM

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
77.	Program Kerjasama Informasi	Persentase Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish;	Jumlah Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish dibagi Jumlah Pemerintah Daerah yang dilaporkan dikali 100%	Report base informasi official Website Pemerintah Daerah
78.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Jumlah usaha koperasi tahun n dikurangi jumlah usaha koperasi tahun (n-1) dibagi jumlah usaha koperasi tahun (n-1) dikali 100%	Report base data usaha koperasi
79.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dibagi jumlah usaha mikro dikali 100%	Report base data usaha mikro
80.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase barang kebutuhan pokok yang dimonitoring tahun n	Jumlah barang pokok yang dimonitoring tahun n dibagi jumlah barang pokok tahun n dikali 100%	Laporan hasil monitoring barang kebutuhan pokok
		Persentase alat UTTP yang dikalibrasi sesuai standar	Jumlah alat UTTP yang dikalibrasi sesuai standar dibagi jumlah alat UTTP dikali 100%	Report basedata alat UTTP
81.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan jumlah eksportir	Jumlah eksportir tahun n dikurangi jumlah eksportir tahun (n-1) dibagi jumlah eksportir tahun (n-1) dikali 100%	Report base data eksportir

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
82.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet penjualan Usaha Mikro, usaha koperasi, IMKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran	Jumlah omzet penjualan Usaha Mikro, usaha koperasi IMKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran tahun n dikurangi Jumlah omzet penjualan Usaha Mikro, usaha koperasi IMKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran tahun (n-1) dibagi Jumlah omzet penjualan Usaha Mikro, usaha koperasi IMKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran tahun (n-1) dikali 100%	Report base data omzet penjualan usaha mikro, usaha koperasi, IMKM
83.	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kabupaten yang dipelihara	Jumlah stand pasar kabupaten yang dipelihara dibagi jumlah stand pasar kabupaten dikali 100%	Report base data stand pasar kabupaten
84.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra IMKM yang difasilitasi	Jumlah sentra IMKM yang difasilitasi dibagi jumlah sentra IMKM dikali 100%	Report base data sentra IMKM
85.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Usaha IMKM yang difasilitasi	Jumlah unit usaha IMKM yang difasilitasi dibagi jumlah unit usaha IMKM dikali 100%	Report base data usaha IMKM

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
86.	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal	Jumlah paket promosi penanaman modal ditambah Jumlah kebijakan penanaman modal ditambah informasi penanaman modal	Report base paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal
87.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	Jumlah izin realisasi investasi yang diverifikasi dibagi Jumlah izin realisasi investasi	Report base verifikasi izin realisasi investasi
88.	Program Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	Persentase Penyelesaian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	Jumlah Penyelesaian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pengajuan Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan dikali 100%	Report base penyelesaian izin
89.	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dibagi Jumlah pengajuan izin Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan dikali 100%	Report base penyelesaian izin
90.	Program Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas Kepemudaan;	Jumlah pemuda yang dibina tahun n dikurangi Jumlah pemuda yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah pemuda yang dibina tahun n-1 dikali 100%	Report base pemuda yang dibina

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
91.	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase atlit berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi ditambah Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat nasional ditambah Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat internasional dibagi jumlah atlit	Report base atlit berprestasi
		Jumlah partisipan olahraga rekreasi	Jumlah partisipan olahraga rekreasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik	Report base partisipan olahraga rekreasi
		Persentase sarpras olahraga yang dipelihara	Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara dibagi Jumlah sarpras olahraga dikali 100%	Data pemeliharaan Saprass olahraga
92.	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	Jumlah pemustaka tahun n dikurangi Jumlah pemustaka tahun n-1 dibagi Jumlah pemustaka tahun n-1 dikali 100%	Data Pemustaka
		Persentase Peningkatan koleksi bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka tahun n dikurangi Jumlah bahan pustaka tahun n-1 dibagi Jumlah bahan pustaka tahun n-1 dikali 100%	Report base koleksi bahan pustaka
		Persentase Perpustakaan yang dibina	Jumlah perpustakaan yang dibina dibagi Jumlah perpustakaan dikali 100%	Report base pembinaan perpustakaan
93.	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase pencipta arsip yang dibina	Jumlah pencipta arsip/ pengelola kearsipan yang dibina dibagi Jumlah pencipta arsip/ pengelola kearsipan dikali 100%	Report base pembinaan pencipta arsip/ pengelola kearsipan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
94.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton) a. Air Payau b. Air Tawar	a. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Air Payau b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Air Tawar	Report base produksi perikanan budidaya Air Payau dan Air Tawar
		Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	Jumlah saluran tambak yang direhabilitasi dibagi Jumlah saluran tambak dikali 100%	Report base rehabilitasi saluran tambak
95.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Report base produksi perikanan tangkap
		Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	Jumlah tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi dibagi Jumlah tempat pendaratan ikan dikali 100%	Report base rehabilitasi tempat pendaratan ikan
96.	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Wp3k)	Produktivitas Garam	Jumlah produksi garam	Report base produksi garam
		Persentase Tambatan Perahu dan Dermaga yang direhabilitasi	Jumlah Tambatan Perahu dan Dermaga yang direhabilitasi dibagi Jumlah Tambatan Perahu dan Dermaga dikali 100%	Report base rehabilitasi Tambatan Perahu dan Dermaga
		Luas kawasan pesisir yang direhabilitasi:	Luas kawasan pesisir yang direhabilitasi dibagi Luas kawasan pesisir dikali 100%	Report base rehabilitasi kawasan pesisir

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
97.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan	Jumlah produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan dibagi Jumlah produksi Perikanan dikali 100%	Report base produksi dan pemasaran olahan perikanan
98.	Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya	Persentase Cagar Budaya yang difasilitasi	Jumlah cagar budaya yang difasilitasi dibagi Jumlah cagar budaya dikali 100%	Report base fasilitasi Cagar Budaya
99.	Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dibagi Jumlah jenis festival seni dan budaya dikali 100%	Report base penyelenggaraan festival seni dan budaya
100.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun n Jumlah kunjungan wisata dalam negeri	Report base kunjungan wisata
101.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dikali 100%	Report base pelaku usaha ekonomi kreatif

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
102.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dibagi Jumlah destinasi wisata	Report base pengembangan destinasi wisata
103.	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penanganan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terserang hama dan penyakit	(Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terserang hama dan penyakit yang ditangani : Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terserang hama dan penyakit) x 100%	Report Base Penanganan hama dan penyakit tanaman
104.	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	Data BPS
105.	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan	Persentase penanganan luas lahan Tanaman Perkebunan yang terserang hama dan penyakit	(Luas lahan Tanaman Perkebunan yang terserang hama dan penyakit yang ditangani : Luas lahan Tanaman Perkebunan yang terserang hama dan penyakit) x 100%	Report Base Penanganan hama dan penyakit tanaman
106.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan	Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan	Data BPS

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
107.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah	Jenis Varietas Bahan Baku nikotin Rendah yang beredar	Laporan peredaran Jenis Varietas Bahan Baku nikotin Rendah
		Persentase kelompok tani tembakau yang difasilitasi	$(\text{Jumlah kelompok tani tembakau yang difasilitasi} : \text{Jumlah kelompok tani tembakau}) \times 100\%$	Data kelompok tani tembakau
108.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	Data BPS
109.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penanganan terhadap jumlah ternak yang terserang penyakit;	$(\text{Jumlah ternak yang terserang penyakit yang ditangani} : \text{Jumlah ternak yang terserang penyakit}) \times 100\%$	Report base penanganan penyakit ternak
110.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	$(\text{Jumlah Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik} : \text{Jumlah Infrastruktur Pendukung pertanian}) \times 100\%$	Data Infrastruktur pertanian
111.	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	$(\text{Jumlah kelompok tani klasifikasi kelas utama} : \text{Jumlah kelompok tani}) \times 100\%$	Data Kelas kelompok tani

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
112.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	(Jumlah penyuluh bersertifikat : Jumlah penyuluh) x 100%	Data Penyuluh
113.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian yang dipasarkan	(Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian yang dipasarkan : Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian) x 100%	Data Produk olahan pertanian
114.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	(Jumlah capaian koefisien varian (CV) stabilitas harga pangan : Jumlah komoditas pangan yang dipantau) x 100%	Data BPS
		Persentase Keamanan Pangan Segar	(Jumlah sampel Pangan Segar yang diuji dengan hasil baik : Jumlah sampel pangan segar yang diuji) x 100%	Data Pangan segar
		Pola Pangan Harapan	% AKG Komoditas n X Bobot	Data skor pola pangan harapan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
115.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	(Jumlah temuan audit yang bersifat material nihil : Jumlah temuan audit) x 100%	Hasil Audit Internal
116.	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase peraturan yang ditetapkan	(Jumlah Peraturan yang ditetapkan : Jumlah peraturan yang dibutuhkan) x 100%	Data Regulasi Inspektorat
117.	Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang bersertifikat Bidang Pengawasan	(Jumlah APIP yang bersertifikat Bidang Pengawasan : Jumlah APIP) x 100%	Data Kepegawaian
118.	Program Penguatan Pengawasan Daerah	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPIP	(Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPIP : Jumlah SKPD) x 100%	Laporan pelaksanaan SPIP

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
119.	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelenggara Negara/ASN Yang Melaporkan Harta Kekayaannya	(Jumlah Penyelenggara Negara/Asn Yang Melaporkan Harta Kekayaannya : Jumlah Penyelenggara Negara/Asn) x 100%	Data Pelaporan Harta Kekayaan ASN
120.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	(Jumlah kegiatan pembangunan lingkup bidang ekonomi yang selaras:Jumlah kegiatan pembangunan sektor ekonomi) x 100%	Renstra OPD, RPJMD
121.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	(Jumlah kegiatan pembangunan lingkup bidang Sosial Budaya yang selaras:Jumlah kegiatan pembangunan sektor Sosial Budaya) x 100%	Renstra OPD, RPJMD
122.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Prasil SDA dan LH	(Jumlah kegiatan pembangunan lingkup bidang Prasil SDA dan LH yang selaras:Jumlah kegiatan pembangunan sektor Prasil SDA dan LH) x 100%	Renstra OPD, RPJMD
123.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	(Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis : Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD x 100%	Hasil Musrenbang
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	(Jumlah Program Pembangunan RPJMD dengan capaian nilai minimal 76 : Jumlah Program Pembangunan RPJMD) x 100%	Laporan Monev Program dan kegiatan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
124.	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	(Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti : Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan)x 100%	Data kajian dan penelitian
125.	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	(Jumlah Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan : Jumlah Data Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan) x 100%	Data Perencanaan Pembangunan
126.	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Persentase SKPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan	(Jumlah SKPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan : Jumlah SKPD yang menyusun DPA) x 100%	DPA OPD
127.	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	(Jumlah SKPD yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah : Jumlah SKPD) x 100%	Data Laporan keuangan
128.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	(Jumlah barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset : Jumlah barang milik daerah) x 100%	Simbada

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
129.	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB)	(Realisasi pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB) : Target pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB) x 100%	Laporan Pendapatan Daerah
130.	Program Pengelolaan Pendapatan PBB Dan BPHTB	Persentase capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB	(Realisasi Pendapatan PBB dan BPHTB : Target Pendapatan PBB dan BPHTB) x 100%	Laporan Pendapatan Daerah
131.	Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian target penagihan pajak daerah terhadap tunggakan potensial	(Realisasi penagihan pajak daerah terhadap tunggakan potensial : Target penagihan pajak daerah terhadap tunggakan potensial) x 100%	Laporan Penagihan pajak
		Persentase capaian target pendapatan daerah selain pajak daerah	(Realisasi pendapatan daerah selain pajak daerah : Target pendapatan daerah selain pajak daerah) x 100%	Laporan Pendapatan Daerah
		SKM Pelayanan Pajak	Nilai SKM Hasil Survey	Hasil Survey SKM
132.	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Prosentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional lebih dari 80 JP	(Jumlah ASN yang sudah diklat teknis/fungsional lebih dari 80JP/Tahun : Jumlah ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik) x 100%	Data Diklat ASN
		Prosentase Pejabat Struktural yang sudah memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan jenjangnya	(Jumlah Pejabat yang telah memiliki sertifikat diklatPIM sesuai dengan jenjangnya:	ASN yang mengikuti diklat

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik) x 100%	
133.	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1. Prosentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target	(Jumlah ASN yang yang SKP Bulanannya lebih dari 85% : Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Gresik) x 100%	Data laporan SKP
		2. Prosentase ASN yang tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin jam kerja	(Jumlah ASN yang tidak pernah melakukan hukuman disiplin jam kerja : Jumlah ASN lingkungan Pemkab Gresik) x 100%	Data laporan Disiplin ASN
134.	Program Mutasi dan Kependidikan ASN	Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab	(Jumlah Usulan Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan : Jumlah ASN di lingkungan Pemkab Gresik) x 100%	Data Penempatan ASN
		1. Prosentase kenaikan pangkat tepat waktu	(Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat : Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan) x 100%	Laporan kenaikan pangkat
		Prosentase penyerahan SK Pensiun tepat waktu	(Jumlah Usulan Pengajuan Pensiun : Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan) x 100%	Data penerbitan SK Pensiun
135.	Program Data Formasi dan Pengembangan ASN	Prosentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK	(Jumlah kebutuhan formasi ASN Pemkab Gresik : Hasil Penghitungan ABK Kabupaten Gresik) x 100%	Data Formasi ASN
		Prosentase akurasi data kepegawaian	(Jumlah data ASN yang dilaporkan sesuai dengan juknis : Jumlah ASN di kabupaten Gresik) x 100%	Data SIMPEG

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
136.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan
137.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Produktivitas Pengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah tahun ke n	Data Produk Hukum Daerah
138.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah kebutuhan/rencana Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
139.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	Jumlah Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
140.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH	Jumlah Kebijakan Strategis SDA LH yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Strategis SDA LH dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH
141.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah
142.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah dikali 100%	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
143.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Data SPP SKPD

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
144.	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun laporan kinerja baik	Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja baik dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Laporan Kinerja SKPD
		Persentase SKPD yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	Jumlah SKPD yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
		Persentase SKPD yang menyusun Anjab dan ABK Baik	Jumlah SKPD yang menyusun Anjab dan ABK Baik dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Hasil Anjab dan ABK Perangkat Daerah
		Persentase SKPD/Unit Kerja menyusun SOP Tata Laksana	Jumlah SKPD/Unit Kerja menyusun SOP tata laksana dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Data SOP SKPD
145.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	Jumlah Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah yang dikoordinasi dan difasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah dikali 100%	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
146.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan yang difasilitasi dibagi Jumlah kebutuhan administrasi keuangan dikali 100%	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Administrasi Keuangan
147.	Program Fasilitasi Kehumasan Daerah	Persentase Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;	Jumlah SKPD yang memiliki Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Hasil Laporan PPID
148.	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik	Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik tahun n	Data Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik
149.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	Jumlah Perda Inisiatif DPRD yang ditetapkan dibagi Jumlah Perda Inisiatif DPRD yang diajukan dikali 100%	Data Perda Inisiatif DPRD
150.	Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat	Persentase Hubungan DPRD dengan Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah kegiatan hubungan DPRD dengan masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah kegiatan hubungan DPRD dengan masyarakat dikali 100%	Hasil Fasilitasi Hubungan DPRD dengan masyarakat

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
151.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah konflik sosial yang dapat diselesaikan dibagi Jumlah konflik sosial dikali 100%	Berita Acara Penyelesaian Konflik
		Persentase Pemanfaatan Hak Pilih	Jumlah Pemanfaatan Hak Pilih dibagi Jumlah hak pilih dikali 100%	Berita Acara Pemilihan Umum
		Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga	Jumlah LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga yang dibina dibagi Jumlah LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga dikali 100%	Laporan Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga
		Persentase Pembinaan FKDM	Jumlah FKDM yang dibina dibagi Jumlah FKDM dikali 100%	Laporan Pembinaan FKDM
152.	Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	Jumlah kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi dibagi Jumlah kegiatan pemerintahan desa dikali 100%	Laporan hasil fasilitasi kegiatan pemerintahan desa
		Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP	Jumlah pelayanan sesuai SOP dibagi Jumlah pelayanan dikali 100%	Data SOP Pelayanan Publik Laporan Monev Pelayanan Publik
153.	Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dikali 100%	Laporan hasil pembinaan lembaga kemasyarakatan

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
154.	Program koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah desa dikali 100%	Laporan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan desa
155.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan dibagi Jumlah konflik di wilayah kecamatan dikali 100%	Laporan hasil koordinasi penyelesaian konflik
156.	Program pengelolaan keuangan, asset, dan perekonomian desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Jumlah kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi dibagi Jumlah kegiatan perekonomian desa dikali 100%	Laporan hasil fasilitasi kegiatan perekonomian

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si